

Pemanfaatan Data Rapor Pendidikan untuk Optimalisasi Perencanaan Berbasis Data di Gugus VIII Ketinggian Kecamatan Harau

Deni Muharama¹, Friyatmi^{2*}

¹⁻²Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia

Email: denimuharama27@gmail.com¹, fri.yatmi@fe.unp.ac.id²

*Penulis korespondensi: fri.yatmi@fe.unp.ac.id

Abstract. *The use of the Education Report through Data-Based Planning (DBP) is an important instrument for supporting school decision-making and improving educational quality. However, data availability is not always accompanied by the capacity to interpret and integrate data into strategic planning. This study aimed to analyze the use of the Education Report in DBP, identify implementation gaps, and examine the integration of data into school planning in Cluster VIII Ketinggian, Harau District. This study employed a qualitative approach with a case study design. Informants were purposively selected, consisting of school principals, teachers, education staff/operators/treasurers, and school supervisors. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, supported by source and technique triangulation. The Education Report was used to determine priorities, develop programs, allocate budgets, and support learning practices. However, data literacy, root-cause analysis, traceability, monitoring, evaluation, and follow-up remained suboptimal. Optimizing DBP requires strengthening data literacy, collaborative analysis, system-based leadership, and continuous monitoring and follow-up cycles.*

Keywords: *Data-Based Planning; Education Quality; Education Report Card; School Decision-Making; School Planning.*

Abstrak. Pemanfaatan Rapor Pendidikan melalui Perencanaan Berbasis Data (PBD) menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan mutu sekolah. Namun, ketersediaan data belum selalu diikuti kemampuan sekolah dalam menginterpretasikan dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam PBD, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, serta memahami integrasi data ke dalam perencanaan sekolah di Gugus VIII Ketinggian Kecamatan Harau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive, meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan/operator/bendahara, dan pengawas. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta triangulasi. Rapor Pendidikan telah digunakan untuk menentukan prioritas, menyusun program, mengarahkan anggaran, dan mendukung praktik pembelajaran. Namun, literasi data, analisis akar masalah, keterlacakan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut belum optimal. Optimalisasi PBD memerlukan penguatan literasi data, analisis kolaboratif, kepemimpinan berbasis sistem, serta siklus monitoring dan tindak lanjut berkelanjutan.

Kata Kunci: Kualitas Pendidikan; Pengambilan Keputusan Sekolah; Perencanaan Berbasis Data; Perencanaan Sekolah; Rapor Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi pendidikan nasional dalam beberapa tahun terakhir diarahkan pada penguatan tata kelola satuan pendidikan berbasis data melalui kebijakan Merdeka Belajar (Lembong et al., 2023); (Sulistyo et al., 2024). Kebijakan tersebut menempatkan satuan pendidikan sebagai pusat pengambilan keputusan yang otonom, tetapi tetap didasarkan pada data dan kebutuhan peserta didik. Implementasinya diwujudkan melalui Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, serta merancang program peningkatan mutu secara lebih objektif dan berkelanjutan (Hidayah et al., 2025); (Rismawati et al., 2026).

Secara konseptual, PBD mengharuskan sekolah melakukan identifikasi masalah berdasarkan indikator prioritas, refleksi terhadap akar permasalahan, serta perumusan intervensi yang terukur dan sesuai dengan rekomendasi Rapor Pendidikan (Rustiyana, 2026); (Anggriawan & Muspawi, 2023). Hasil analisis tersebut idealnya terintegrasi secara nyata dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta rencana strategis sekolah. Namun, kondisi mutu pendidikan nasional yang masih menghadapi ketimpangan capaian literasi dan numerasi menunjukkan bahwa pemanfaatan data belum semata-mata menjadi persoalan ketersediaan informasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sekolah menerjemahkan data menjadi kebijakan dan program yang tepat sasaran.

Fenomena implementasi PBD menunjukkan bahwa pemanfaatan Rapor Pendidikan di tingkat sekolah belum sepenuhnya mencapai fungsi strategisnya. (Astuti et al., 2025), menemukan bahwa pemanfaatan Rapor Pendidikan masih terbatas pada pembacaan indikator dan belum diikuti analisis mendalam untuk kebutuhan perencanaan. Kondisi tersebut diperkuat oleh (Herfiyanti et al., 2024; Syafril et al., 2026), yang menunjukkan adanya kendala berupa rendahnya literasi data, keterbatasan kemampuan menganalisis indikator mutu, serta belum optimalnya kolaborasi dalam manajemen sekolah. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketersediaan data sebagai instrumen kebijakan dengan kemampuan sekolah dalam memanfaatkannya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena perencanaan sekolah yang tidak didasarkan pada diagnosis data berpotensi menghasilkan program yang bersifat rutin dan administratif, bukan program yang responsif terhadap kebutuhan peningkatan mutu. (Rahmawati, 2022; Darmawan et al., 2026), menemukan fenomena *compliance without transformation*, yaitu pelaksanaan kebijakan lebih berorientasi pada pemenuhan tuntutan administratif daripada perubahan substantif dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, (Prasetyo, 2021; Risanto et al., 2026), menunjukkan adanya kesenjangan antara *policy design* dan *policy practice*, ketika kebijakan telah dirancang berbasis indikator mutu tetapi implementasinya masih dipengaruhi kebiasaan lama, keterbatasan kapasitas manajerial, dan pertimbangan pragmatis. Hal ini menunjukkan urgensi penguatan budaya pengambilan keputusan berbasis data di tingkat satuan pendidikan.

Selain kapasitas analisis data, kepemimpinan sekolah juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pemanfaatan Rapor Pendidikan. Lestari (2022) menunjukkan bahwa kepala sekolah dengan kapasitas literasi data dan kepemimpinan strategis yang baik cenderung lebih mampu menerjemahkan indikator evaluasi menjadi program prioritas yang konkret. Sebaliknya, kepemimpinan yang lebih berorientasi administratif cenderung

mempertahankan pola perencanaan rutin tanpa memanfaatkan hasil diagnosis data secara optimal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan PBD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan platform dan informasi, tetapi juga oleh proses interpretasi, kapasitas aktor, kepemimpinan, dan mekanisme pengambilan keputusan di sekolah.

Fenomena tersebut juga terlihat pada Gugus VIII Ketinggian Kecamatan Harau, di mana seluruh sekolah dasar telah memiliki akses terhadap Rapor Pendidikan dan diarahkan untuk melaksanakan PBD. Namun, berdasarkan pengamatan awal, terdapat variasi dalam pemanfaatan data pada dokumen perencanaan sekolah. Sebagian sekolah telah mulai menggunakan indikator prioritas sebagai dasar penyusunan program kerja, sedangkan sebagian lainnya masih menggunakan pola perencanaan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar ketersediaan data, melainkan bagaimana data diinterpretasikan, digunakan, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan serta rencana strategis sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara rekomendasi Rapor Pendidikan dengan kebijakan aktual sekolah serta proses integrasinya ke dalam rencana strategis, khususnya pada konteks gugus sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana Rapor Pendidikan dimanfaatkan dalam PBD, mengidentifikasi bentuk kesenjangan antara rekomendasi data dan kebijakan sekolah, serta memahami proses pengambilan keputusan dalam integrasi data ke dalam rencana strategis sekolah. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kebijakan digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik implementasi PBD dan merumuskan model kebijakan yang kontekstual serta aplikatif bagi sekolah dasar di Gugus VIII Ketinggian Kecamatan Harau.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*) untuk memahami secara mendalam pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam perencanaan strategis sekolah, termasuk proses, hambatan, dan strategi integrasi data ke dalam kebijakan sekolah (Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan di satuan pendidikan yang menjadi lokasi penelitian, dengan informan dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan serta Perencanaan Berbasis Data (PBD). Informan terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan/operator/bendahara, dan pengawas sekolah. Data primer diperoleh melalui

wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa Rapor Pendidikan, RKS, RKT, RKAS, RTL, notulen rapat, serta dokumen program dan bukti pelaksanaan PBD.

Analisis data menggunakan model interaktif (Miles et al., 2020), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi dilakukan melalui seleksi, peringkasan, pengkodean, dan pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, seperti pemanfaatan data, hambatan implementasi, strategi integrasi, peran kepemimpinan, dan kesenjangan implementasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk matriks tematik, narasi, kutipan informan, dan tabel ringkasan untuk menemukan pola serta hubungan antartema. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, serta dokumentasi proses penelitian, sehingga temuan yang diperoleh dapat menggambarkan secara kontekstual pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam perencanaan strategis sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam PBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sekolah telah memiliki akses terhadap Rapor Pendidikan dan hasil unduhan data. Pada tahap awal, data digunakan untuk memahami kondisi sekolah dan mengidentifikasi indikator yang perlu mendapat perhatian. Akses teknis berbeda antar sekolah karena kondisi jaringan dan perangkat, tetapi seluruh sekolah memiliki mekanisme alternatif melalui pengunduhan data.

Pada tahap interpretasi, data mulai dibahas dalam rapat sekolah dan digunakan untuk menentukan indikator prioritas. Namun, kedalaman interpretasi belum seragam. Sebagian aktor telah menghubungkan indikator dengan persoalan pembelajaran, sementara sebagian lainnya masih memahami Rapor Pendidikan pada tingkat capaian dan rekomendasi umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap data telah relatif teratasi, sedangkan literasi untuk menafsirkan data menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti masih menjadi persoalan.

Analisis akar masalah juga belum sepenuhnya seragam. Sekolah cenderung lebih mudah menetapkan prioritas pada masalah yang konkret dan relatif mudah diintervensi, seperti literasi, numerasi, kegiatan membaca, remedial, atau pengadaan alat peraga. Sebaliknya, indikator yang memerlukan perubahan organisasi dan budaya, seperti iklim pembelajaran, karakter, atau pola kolaborasi, lebih sulit diterjemahkan secara konsisten.

Pada tingkat pembelajaran telah muncul tindakan yang menunjukkan bahwa data mulai memengaruhi praktik, antara lain kegiatan membaca, kelompok baca, remedial, bimbingan tambahan, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, dan penggunaan bahan ajar yang

lebih bervariasi. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan Rapor Pendidikan tidak dapat dikategorikan semata-mata administratif. Akan tetapi, perubahan tersebut belum menjadi sistem organisasi yang konsisten di seluruh sekolah.

Kesenjangan Implementasi PBD

Kesenjangan implementasi ditemukan pada lima lapisan yang saling berinteraksi: kompetensi, waktu, sumber daya, dukungan eksternal, dan paradigma pengambilan keputusan. Pertama, kemampuan membaca dan menganalisis data belum merata. Ketergantungan pada kepala sekolah atau operator masih tampak dalam beberapa sekolah. Kedua, terdapat persoalan sinkronisasi antara waktu rilis data dan siklus perencanaan serta penganggaran. Data terbaru tidak selalu tersedia ketika keputusan RKAS harus ditetapkan, sehingga sekolah dalam kondisi tertentu menggunakan data tahun sebelumnya atau melakukan penyesuaian. Ketiga, keterbatasan anggaran membatasi pilihan intervensi. Tidak semua rekomendasi dapat diterjemahkan menjadi program secara bersamaan sehingga sekolah harus memilih prioritas. Keempat, pendampingan eksternal telah tersedia, tetapi kebutuhan sekolah tidak selalu cukup dipenuhi melalui pelatihan satu kali; pendampingan berbasis kasus dan coaching berkelanjutan lebih relevan untuk membangun kemampuan analisis. Kelima, pengalaman dan kebiasaan masih digunakan bersama data dalam pengambilan keputusan. Artinya, budaya berbasis bukti telah mulai tumbuh tetapi belum sepenuhnya menjadi norma organisasi.

Temuan ini sejalan dengan studi (Astuti et al., 2025) mengenai hambatan PBD yang mencakup kapasitas SDM, anggaran, waktu, sarana, dan dukungan. Temuan tersebut juga konsisten dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa literasi data merupakan prasyarat penting bagi penggunaan data secara efektif, sedangkan pengembangan kapasitas memerlukan pengalaman dan dukungan yang memadai.

Penerjemahan Data ke Program, Anggaran, dan Tindak Lanjut

Penerjemahan hasil analisis Rapor Pendidikan telah terlihat pada penetapan prioritas, penyusunan program, dan penganggaran. Program yang muncul antara lain kegiatan literasi, numerasi, remedial, bimbingan tambahan, pendampingan membaca, peningkatan kompetensi guru melalui KKG, serta pengadaan alat atau bahan pembelajaran. Sebagian program telah masuk dalam RKT dan RKAS.

Namun, keterlacakan belum utuh. Hubungan antara indikator prioritas, akar masalah, program, target, pelaksana, anggaran, indikator keberhasilan, monitoring, dan evaluasi belum selalu dapat ditunjukkan secara eksplisit. Dengan demikian, keberadaan program di RKAS tidak selalu cukup untuk membuktikan bahwa seluruh tahapan PBD telah berjalan.

Ketersediaan dokumen mencapai 91,7% dan kesesuaian anggaran 93,3%, sedangkan bukti implementasi hanya 50,0%. Kesenjangan terbesar terdapat pada monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Laporan monitoring-evaluasi belum ditemukan secara sistematis pada keenam sekolah, sementara dokumen RTL belum tersedia pada sebagian sekolah. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara perencanaan dan pelaksanaan.

Pola tersebut penting karena kebijakan PBD secara resmi tidak berhenti pada identifikasi, refleksi, dan pembenahan awal. Pemerintah juga menempatkan monitoring sebagai tahap untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta melihat perubahan setelah PBD diterapkan. Dengan demikian, kelemahan monitoring dan tindak lanjut dalam penelitian ini menunjukkan bahwa putaran umpan balik belum sepenuhnya tertutup.

Pembahasan

Penggunaan Data menuju Data-Driven Decision Making

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Rapor Pendidikan telah melewati tahap sekadar ketersediaan data. Data telah digunakan untuk menentukan masalah, menyusun prioritas, merancang program, mengarahkan anggaran, dan memengaruhi sebagian praktik pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan PBD yang menempatkan Rapor Pendidikan sebagai sumber data utama untuk penentuan prioritas dan alokasi sumber daya.

Namun, jika dibandingkan dengan kerangka data-driven decision making, proses tersebut belum sepenuhnya matang. Mandinach dan Gummer menekankan bahwa penggunaan data membutuhkan kemampuan mengidentifikasi masalah, mengelola dan memahami data, menginterpretasikan informasi, serta menggunakannya untuk tindakan. Dalam penelitian ini, titik lemah terutama berada pada kedalaman interpretasi dan analisis akar masalah. Dengan demikian, masalah PBD bukan sekadar 'apakah data digunakan', tetapi 'seberapa dalam data mengubah cara sekolah memahami masalah dan mengambil keputusan'.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Indonesia yang menempatkan Rapor Pendidikan sebagai instrumen evaluasi dan perencanaan. Studi Minarso dkk. menegaskan fungsi Rapor Pendidikan dalam evaluasi dan PBD, sementara studi Astuti dkk. menunjukkan adanya hambatan kapasitas dan sumber daya. Penelitian ini menambahkan dimensi penting bahwa keberhasilan penggunaan data harus dinilai dari kesinambungan rantai keputusan, bukan hanya dari keberadaan dokumen perencanaan.

Literasi Data sebagai Mata Rantai Kritis

Variasi kemampuan interpretasi indikator memperlihatkan bahwa literasi data merupakan mata rantai yang menghubungkan informasi dengan keputusan. Data yang tersedia tidak otomatis menjadi pengetahuan yang bermakna. Pendidik membutuhkan kemampuan

untuk membaca pola, mengajukan pertanyaan, menghubungkan indikator dengan praktik, dan menentukan bukti apa yang perlu dikumpulkan untuk menguji dugaan akar masalah.

Kajian Mandinach dan Gummer menunjukkan bahwa data literacy mencakup pengetahuan, keterampilan, dan disposisi. Penelitian van Geel dkk. juga menunjukkan bahwa intervensi yang terstruktur dapat meningkatkan literasi data pendidik. Sementara itu, tinjauan sistematis terbaru menunjukkan bahwa pelatihan literasi data lebih efektif ketika menggunakan konteks autentik, model pengambilan keputusan yang terstruktur, pembelajaran kolaboratif, dan tindak lanjut jangka panjang.

Implikasinya, penguatan PBD di Gugus VIII Ketinggian tidak cukup dilakukan dengan sosialisasi cara mengakses platform. Sekolah membutuhkan mekanisme analisis bersama berbasis kasus sekolah, lembar diagnosis akar masalah, pembiasaan penggunaan bukti pendukung, serta coaching yang membantu guru dan kepala sekolah menghubungkan indikator dengan tindakan.

Kesenjangan Transformasi dan Keterlacakan

Kontribusi analitis utama penelitian ini adalah konsep kesenjangan transformasi dan keterlacakan. Kesenjangan transformasi terjadi ketika data belum sepenuhnya berubah menjadi diagnosis, keputusan, intervensi, dan evaluasi. Kesenjangan keterlacakan terjadi ketika hubungan antara indikator prioritas, akar masalah, program, target, anggaran, pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut tidak dapat dibuktikan secara runtut.

Konsep tersebut memperhalus pemahaman tentang persoalan kepatuhan administratif. Penelitian tidak menemukan bahwa sekolah hanya melakukan kepatuhan tanpa transformasi. Sebaliknya, transformasi telah mulai terjadi: terdapat pembahasan data, prioritas, program, anggaran, dan tindakan pembelajaran. Persoalannya adalah transformasi tersebut belum lengkap dan belum terlembaga sebagai sistem. Karena itu, bukti dokumen yang relatif tinggi perlu dibaca bersama bukti implementasi yang lebih rendah.

Temuan ini juga menguatkan penelitian tentang PBD yang menunjukkan manfaat Rapor Pendidikan dalam perencanaan dan RKAS, tetapi menambahkan bahwa keberhasilan perencanaan perlu diuji melalui fase implementasi dan feedback. Widiyawati dkk. menunjukkan keterkaitan PBD dengan penyusunan RKAS, sedangkan panduan pemerintah menempatkan monitoring sebagai bagian penting setelah perencanaan dan penganggaran.

Kepemimpinan dan Pelembagaan Budaya Data

Kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam menggerakkan diskusi, menetapkan prioritas, dan mengarahkan anggaran. Namun, penelitian menunjukkan adanya ketergantungan pada inisiatif individu kepala sekolah atau operator. Kondisi tersebut membuat keberlanjutan

PBD rentan ketika sistem tidak menyediakan pembagian peran, jadwal analisis, instrumen dokumentasi, dan mekanisme evaluasi yang jelas.

Literatur tentang literasi data kepala sekolah menunjukkan bahwa penggunaan data oleh pemimpin berbeda dari penggunaan data oleh guru. Kepala sekolah tidak hanya perlu mampu membaca data, tetapi juga memimpin pembentukan budaya data, menggunakan data untuk perbaikan sekolah, dan menghubungkan penggunaan data dengan praktik kepemimpinannya. Karena itu, kepemimpinan berbasis data dalam konteks penelitian ini perlu bergeser dari 'kepala sekolah sebagai penggerak utama' menjadi 'kepala sekolah sebagai pembangun sistem'.

Pergeseran tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan tim PBD, pembagian peran analisis, jadwal refleksi berkala, dokumentasi keputusan, dan penggunaan indikator keberhasilan yang dapat diverifikasi. Dengan cara ini, ownership terhadap PBD tidak hanya berada pada kepala sekolah, tetapi tersebar pada guru, operator, tenaga kependidikan, dan pengawas.

Integrasi RKT dan RKAS: Kuat secara Administratif, Belum Sepenuhnya Substantif

Temuan bahwa kesesuaian anggaran lebih tinggi daripada bukti implementasi menunjukkan bahwa sekolah relatif mampu memasukkan kebutuhan prioritas ke dalam dokumen anggaran. Ini merupakan perkembangan penting karena PBD memang dirancang untuk mengarahkan penggunaan sumber daya agar lebih tepat sasaran.

Namun, integrasi substantif menuntut lebih dari sekadar keberadaan kegiatan yang memiliki kemiripan dengan indikator Rapor Pendidikan. Program seharusnya dapat ditelusuri dari masalah yang dipilih, akar masalah yang dibuktikan, target perubahan, kegiatan, anggaran, pelaksana, bukti pelaksanaan, hasil, dan keputusan tindak lanjut. Tanpa keterlacakan tersebut, RKAS berisiko menjadi dokumen yang secara administratif selaras tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen manajemen mutu.

Temuan ini sejalan dengan studi PBD di sekolah dasar yang menunjukkan bahwa Rapor Pendidikan dapat menjadi dasar perencanaan, tetapi kapasitas analisis dan keterbatasan sumber daya masih menentukan kedalaman penerapannya.

Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut sebagai Feedback Loop

Tahap yang paling kritis dalam penelitian adalah monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Ketika dokumen perencanaan dan anggaran telah tersedia tetapi bukti implementasi hanya 50,0%, pertanyaan manajerial yang penting bukan lagi 'apa yang direncanakan?', melainkan 'apa yang benar-benar dilaksanakan, apa hasilnya, dan apa yang diubah berdasarkan hasil tersebut?'.

PBD yang utuh harus menghasilkan umpan balik. Data awal digunakan untuk diagnosis; diagnosis menghasilkan program; program menghasilkan tindakan; tindakan dipantau; hasil dievaluasi; evaluasi menghasilkan tindak lanjut; dan tindak lanjut menjadi input bagi perencanaan berikutnya. Tanpa putaran ini, sekolah memiliki perencanaan berbasis data tetapi belum memiliki manajemen mutu berbasis data.

Panduan resmi PBD menegaskan pentingnya monitoring untuk memastikan kesesuaian rencana dan pelaksanaan serta melihat perubahan sebelum dan sesudah penerapan PBD. Oleh sebab itu, temuan penelitian dapat ditafsirkan sebagai kebutuhan untuk memperkuat mekanisme feedback, bukan sekadar menambah dokumen.

Model Optimalisasi Pbd

Berdasarkan sintesis temuan, optimalisasi PBD pada sekolah dasar di Gugus VIII Ketinggian dapat dirumuskan sebagai siklus manajemen mutu berikut:

“Data Tepat Waktu → Literasi Data → Analisis Bersama → Analisis Akar Masalah → Penetapan Prioritas → Program Dan Target → Integrasi Rks/Rkt/Rkas → Pelaksanaan → Monitoring → Evaluasi → Refleksi → Tindak Lanjut → Perencanaan Berikutnya.”

Model ini menempatkan Rapor Pendidikan bukan hanya sebagai titik awal perencanaan, tetapi sebagai sumber umpan balik bagi siklus berikutnya. Kepala sekolah berperan sebagai pengarah dan pembangun sistem; guru dan tenaga kependidikan menjadi pengguna sekaligus pelaksana; operator mendukung pengelolaan dan dokumentasi data; pengawas memberikan pendampingan dan umpan balik; sedangkan RKS/RKT/RKAS menjadi mekanisme formal penerjemahan keputusan.

Agar model berjalan, setiap program prioritas perlu memiliki 'jejak keputusan' minimal: indikator Rapor Pendidikan yang menjadi dasar, akar masalah, program/kegiatan, target, penanggung jawab, anggaran, bukti pelaksanaan, indikator hasil, hasil monitoring-evaluasi, dan tindak lanjut. Instrumen sederhana tersebut dapat mengatasi masalah keterlacakan yang ditemukan penelitian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Rapor Pendidikan di Gugus VIII Ketinggian Kecamatan Harau telah digunakan dalam mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, menyusun program, mengarahkan anggaran, serta mendukung perbaikan praktik pembelajaran, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan dalam literasi data, analisis akar masalah, keterlacakan antara data dan

program, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Ketersediaan dokumen perencanaan dan kesesuaian anggaran relatif baik, tetapi bukti implementasi dan mekanisme umpan balik belum berjalan secara sistematis. Oleh karena itu, sekolah disarankan memperkuat literasi data melalui analisis kolaboratif dan pendampingan berkelanjutan, membangun pembagian peran dalam tim PBD, memperjelas keterlacakan antara indikator, akar masalah, program, target, anggaran, pelaksanaan, dan hasil, serta memperkuat monitoring, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut agar Rapor Pendidikan tidak hanya menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan, tetapi berkembang menjadi instrumen manajemen mutu sekolah yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggriawan, F., & Muspawi, M. (2023). Analisis rapor pendidikan dalam perencanaan berbasis data pada RKAS SMPN 4 Betara. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*.
- Astuti, A. W., Azainil, A., & Warman. (2025). Analisis rapor pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan berbasis data dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Bontang Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Teknologi*. <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v6i2.23021>
- Darmawan, D., et al. (2026). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar. *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.59024/simpati.v4i3.2303>
- Herfiyanti, N., Setiyanti, W., & Wulandari, A. (2024). Peningkatan mutu sekolah dengan perencanaan berbasis data rapor pendidikan. *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3149>
- Hidayah, E., Sofiyanti, E., Inayah, I., & Muniati, N. A. N. (2025). Perencanaan berbasis data rapor pendidikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan mutu sekolah. *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4317>
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar sebagai transformasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2). <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, B. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan berbasis bukti: Kesenjangan desain dan praktik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 134–150.
- Rahmawati, N. (2022). Implementasi manajemen berbasis data di sekolah dasar: Fenomena kepatuhan tanpa transformasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 9(1), 45–60.
- Rismawati, Sa'diyyah, R., Rokhaniah, Utami, W. B., & Murniati, N. A. N. (2026). Implementasi perencanaan berbasis data dalam peningkatan mutu pendidikan. <https://doi.org/10.35473/janacitta.v9i1.4473>
- Risanto, B., et al. (2026). Peran strategis konsultan pajak dalam pengambilan keputusan bisnis pada perusahaan berbasis teknologi: Studi literatur. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 3(3), 1–10. <https://doi.org/10.61132/eksap.v3i3.2403>

- Rustiyana. (2026). Analisis efektivitas perencanaan berbasis data (PBD) berdasarkan rapor pendidikan terhadap peningkatan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.62518/bmft1q20>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo, F. D., Widjaja, I., Josua, N. P., & Asropi, A. (2024). Pemanfaatan rapor pendidikan sebagai alat transformasi kebijakan pendidikan (studi kasus pada SMP Negeri 5 Depok). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 17(1). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v17i1.830>
- Syafril, H., et al. (2026). Peran mahasiswa KKN dalam meningkatkan minat belajar Al-Qur'an anak-anak melalui program TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang menyenangkan dan interaktif di Dusun 3 Desa Paya Bagas. *Jurnal Insan Pengabdian Indonesia*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.62007/jouipi.v4i3.1018>